

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solo Pos

Wilayah Berita: Kabupaten Sragen

Halaman 22

Dana Perimbangan: DAK 2018 Anjlok Rp14,18 Miliar

SRAGEN—Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemkab Sragen berkurang Rp14,18 miliar pada 2018. DAK yang direncanakan Rp258,44 miliar pada APBD penetapan 2018, menjadi Rp244,26 miliar pada APBD Perubahan 2018. Penurunan DAK tersebut dipertanyakan kalangan legislator.

Sebelumnya, Bupati Sragen KUSDINAR Untung Yuni Sukowati menjelaskan struktur Rancangan APBD Perubahan 2018. Pendapatan daerah pada RAPBD Perubahan 2018 meningkat dari Rp1,95 triliun pada APBD Penetapan menjadi Rp2,12 triliun pada RAPBD Perubahan 2018.

Pendapatan daerah tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat dari Rp293,21 miliar menjadi Rp327,50 miliar. Selain dari PAD, pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan.

“Dana perimbangan yang sebelumnya diproyeksikan Rp1,416 triliun turun menjadi Rp1,411 triliun. Penurunan tersebut berasal

dari berkurangan DAK senilai Rp14,18 miliar. Namun, di sisi bagi hasil pajak dan bukan pajak naik Rp209,89 juta dan penambahan dana insentif daerah senilai Rp9 miliar,” ujar Bupati, Senin (10/9).

Tunjangan Profesi

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Sragen, Sutrisno, menyampaikan apresiasi atas peningkatan PAD yang berasal dari peningkatan retribusi daerah. Dia meminta peningkatan PAD disesuaikan dengan potensi pendapatan.

Sutrisno mempertanyakan turunnya dana perimbangan, terutama DAK senilai Rp14,18 miliar. “Apa yang melatarbelakangi turunnya DAK tersebut padahal Sragen mendapat predikat wajar tanpa pengecualian [WTP] dari BPK [Badan Pemeriksa Keuangan],” ujarnya, Rabu (12/9).

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sragen, Heru Agus Santoso, juga mempertanyakan

hilangnya DAK Rp14,18 miliar dan meminta penjelasan tentang pengelolaan aset daerah senilai Rp900 juta.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen, Dwiyanto, saat ditemui *Espos* di DPRD Sragen, Rabu siang, mengaku belum tahu penyebab turunnya DAK setelah APBD Perubahan 2018. DAK yang semula direncanakan Rp258,44 miliar turun menjadi Rp244,26 miliar.

“Pengurangan DAK yang paling banyak berasal dari tunjangan profesi guru senilai Rp8 miliaran. Tunjangan profesi guru itu semula Rp215,48 miliar, turun menjadi Rp206,49 miliar. Kemudian penurunan yang cukup signifikan terjadi pada bantuan operasional kesehatan [BOK] sampai Rp3 miliar. Untuk beberapa item kegiatan dari DAK juga turun, tetapi nilainya hanya ratusan juta rupiah. Hari ini kami mengumpulkan pihak terkait untuk mengetahui penyebab turunnya DAK,” ujarnya. *(Tri Rahayu)*